

***Policy Formulation Failure of the PKR Regional Regulation
Through the Lens of Religious Favoritism***

By Harvian Harsim Iskandar

Abstract

This study examines the phenomenon of Islamic favoritism in the initiative of the Religious City Implementation Regional Regulation by the Depok City Government in 2019. Through a qualitative descriptive approach, this research analyzes how Islamic favoritism influenced the formulation process of this regional regulation draft, utilizing public choice theory and elite theory to examine the dynamics of power and policy-making processes. Data was collected through in-depth interviews with key stakeholders, including representatives from DPRD Depok City, DPC PKS Depok City, PDIP Faction, PC NU Depok City, and SETARA Institute. The findings reveal that the Religious City regulation initiative reflects the dominance of elite interests and religious favoritism in local policy-making, demonstrated through the use of formal governmental structures to advance majority religious interests, limited public participation in the policy formulation process, and potential constitutional violations regarding regional authority and religious affairs. The study concludes that this regulation draft exemplifies how local political elites utilize religious symbolism and formal policy instruments to consolidate political support, despite concerns about discrimination against religious minorities. This research contributes to understanding religious-based policy-making in Indonesia's decentralized context and highlights the challenges of maintaining constitutional principles in local governance.

Keywords: Islamic Favoritism, Local Politics, Public Policy, Religious Regulation, Depok City

Kegagalan Formulasi Kebijakan Perda PKR Melalui Perspektif Favouritisme Agama

Oleh Harvian Harsim Iskandar

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena favoritisme Islam dalam inisiatif Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kota Religius oleh Pemerintah Kota Depok pada tahun 2019. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis bagaimana favoritisme Islam mempengaruhi proses formulasi rancangan peraturan daerah tersebut dengan menggunakan teori elit untuk mengkaji dinamika kekuasaan dan proses pembuatan kebijakan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama, termasuk perwakilan dari DPRD Kota Depok, DPC PKS Kota Depok, Fraksi PDIP, PC NU Kota Depok dan SETARA Institute. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa inisiatif Raperda Kota Religius mencerminkan dominasi kepentingan elit dan favoritisme agama dalam pembuatan kebijakan lokal, yang ditunjukkan melalui penggunaan struktur pemerintahan formal untuk memajukan kepentingan agama mayoritas, terbatasnya partisipasi publik dalam proses formulasi kebijakan, dan potensi pelanggaran konstitusional terkait kewenangan daerah dan urusan keagamaan. Penelitian menyimpulkan bahwa rancangan peraturan ini menggambarkan bagaimana elit politik lokal menggunakan simbolisme agama dan instrumen kebijakan formal untuk mengkonsolidasi dukungan politik, terlepas dari kekhawatiran tentang diskriminasi terhadap minoritas agama. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang pembuatan kebijakan berbasis agama dalam konteks desentralisasi Indonesia dan menyoroti tantangan mempertahankan prinsip-prinsip konstitusional dalam tata kelola pemerintahan lokal.

Kata Kunci: Favoritisme Islam, Politik Lokal, Kebijakan Publik, Regulasi Keagamaan, Kota Depok